

THE SPREAD OF FOOT AND MOUTH DISEASE ON LIVESTOCK IN THE EX SEMARANG RESIDENCY 1981-1986

PENYEBARAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU PADA TERNAK DI EKS KARESIDENAN SEMARANG 1981-1986

Dzikri Triyanto Ramadhan ^{1a(*)} Carolina Santi Muji Utami ^{2b}

¹²Universitas Negeri Semarang, Gedung H (Rektorat) Kampus UNNES Sekaran, Gunungpati, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. 50229

^a4badrarama@students.unnes.ac.id

^bmujiutami@mail.unnes.ac.id

(*) Corresponding Author

4badrarama@students.unnes.ac.id

How to Cite: Dzikri Triyanto Ramadhan. (2025).Penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku Ternak di Eks Karesidenan Semarang 1981-1986. doi: 10.36526/js.v3i2.5474

Received : 03-06-2025

Revised : 30-06-2025

Accepted: 11-07-2025

Keywords:

Foot and Mouth Disease,
 Indonesian Livestock,
 ex Semarang Residency

Abstract

The spread of Foot and Mouth Disease (FMD) in livestock throughout the former Semarang Residency area from 1981-1986 was a disease that played a role in the history of Indonesian livestock farming. The outbreak began in Blora and quickly spread to neighboring areas, including Grobogan, Semarang, and Salatiga, due to inadequate biosecurity and the influx of imported infected animals. This study aims to understand how FMD impacted local livestock production and how the government responded to contain the epidemic. Using historical methods involving heuristics, source criticism, interpretation, and historiography, this study draws on archival documents, official reports, newspapers, and oral histories from affected farmers. The study findings reveal that FMD caused major disruptions in meat and milk production, economic losses for farmers, and public panic. In response, the government implemented mass vaccination programs, quarantine zones, and movement restrictions. A key outcome of these efforts was Indonesia's official declaration as a FMD-free country in 1986, which was later recognized by international organizations. The novelty of this study lies in its historical perspective on veterinary crisis management and the strategic role of livestock policies during national emergencies, which offers some novelties in the history of foot and mouth disease in Indonesia.

PENDAHULUAN

Persoalan penyakit menular pada ternak merupakan sebuah persoalan yang selalu menjadi intrik permasalahan yang dapat dibidang cukup rumit dalam hal penanganan maupun pengendaliannya. Hal ini disebabkan karena penyakit menular pada ternak memiliki faktor-faktor penyebaran yang sangat variatif dan cepat. Permasalahan inilah yang menyebabkan penyakit menular pada ternak terutama penyakit mulut dan kuku menjadi sebuah penyakit epidemi dalam suatu wilayah (Sudarsono, 2020). Epidemi sendiri merupakan kategori sebuah penyakit yang muncul dengan karakteristik tertentu dalam suatu negara dan hal ini merupakan sebuah permasalahan konstan yang selalu ada baik dalam kategori pasif maupun masif (Hutajulu, 2021). Begitupun dengan kasus penyakit mulut dan kuku yang merupakan sebuah penyakit menular pada ternak yang dikategorikan sebagai penyakit epidemi pada masa orde baru merupakan sebuah persoalan yang rumit baik dalam pengendalian, penanganan, maupun pemberantasan yang dihadapi pemerintah maupun masyarakat (SK Mentan, 1983).

Persoalan penyakit menular pada ternak menunjukkan bahwa Indonesia telah digemparkan dengan munculnya penyakit mulut dan kuku pada ternak secara masif di berbagai wilayah Indonesia, pada tahun 1981 yang dapat diselesaikan pada tahun 1986. Penyakit mulut dan kuku itu

sendiri merupakan sebuah penyakit menular yang menyerang pada hewan ternak berkaki empat terutama pada hewan mamalia dan babi (SK Mentan, 1983). Persoalan tentang penyakit mulut dan kuku di tahun-tahun tersebut merupakan persoalan baru bagi negara Indonesia yang memang penyakit ini mempengaruhi situasi dan kondisi yang tergolong cukup aman pada masa itu. Pada tahun tersebut belum diketahui secara jelas tentang penyebab utama masuknya penyakit menular ini ke Indonesia, namun dapat dijelaskan bahwa penyakit ini merupakan penyakit menular dari asing dan bukan merupakan penyakit lokal Indonesia.

Permasalahan di atas menjadikan pemerintah dan masyarakat tidak siap akan datangnya penyakit mulut dan kuku ini. Ketidaksiapan terhadap munculnya penyakit mulut dan kuku secara masif ini telah menimbulkan sebuah situasi panik dalam negeri yang mengharuskan semua pihak terkena dampak dan yang paling signifikan adalah dampak akan ekonomi terutama pada penurunan dan kerugian akan penurunan produksi, tenaga kerja, hingga hilangnya aset yang penting dalam mendongkrak ekonomi pihak terkait (Subronto, 2008). Penyebaran penyakit mulut dan kuku di tahun-tahun tersebut menyebar secara masif dan masih belum dapat dikendalikan secara utuh yang mengakibatkan wilayah karesidenan Semarang ikut terkena dampaknya.

Pada masa orde baru, Soeharto sangat memperhatikan bagaimana perkembangan peternakan di Indonesia yang dibuktikan dengan pembentukan beberapa badan yang berfokus pada peternakan dan beberapa direktorat-direktorat jenderal serta beberapa unit-unit yang berfokus pada penelitian dan kerja dalam peternakan. Adapun hal ini dapat dilihat dari keputusan-keputusan presiden tentang pertanian dan peternakan di masa orde baru. Selain hal itu, Soeharto pada masa jabatannya telah menunjukkan perkembangan-perkembangan di bidang peternakan dari program Pelita III, IV, dan V. Perkembangan peternakan di masa orde baru mengalami perkembangan yang cukup signifikan yaitu dimana Soeharto mengeluarkan kebijakan akan peningkatan konsumsi daging sapi di Indonesia. Hal ini dilakukan adalah sebagai upaya untuk masyarakat agar tidak terpacu pada beras sebagai pangan utama dan sebagai upaya untuk mengendalikan ketahanan pangan di Indonesia agar beras tidak terlalu over produksi dan mengalami penurunan kualitas (Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2020). Kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang dapat dikatakan berhasil, namun dari segi kesiapan pemerintah dalam mengatur dan menyediakan komoditas, masih kurang sehingga impor daging harus dilakukan dan menutup kran ekspor sapi (Arista, 2019). Hal itulah dari sekian banyak faktor yang menyebabkan masuknya penyakit mulut dan kuku menyebar secara cepat.

Eks Karesidenan Semarang dijadikan sebagai fokus studi karena memiliki berbagai latar belakang perkembangan peternakan yang cukup apik di tingkat nasional. Karesidenan Semarang merupakan sebuah wilayah di Jawa Tengah yang memiliki beberapa wilayah administratif sendiri yang meliputi kota Semarang, kabupaten Semarang, Kendal, Demak, Salatiga, Grobogan. Wilayah karesidenan Semarang ini merupakan sebuah wilayah dengan basis peternakan yang dapat dibilang sangat progresif di tahun tersebut. Hal ini dapat dilihat dari berbagai perkembangan di beberapa wilayah eks Karesidenan Semarang yang dapat dibagi menjadi tiga antara lain Kabupaten Semarang, Salatiga, dan Grobogan. Dengan masuknya penyakit mulut dan kuku, petani ternak dihadapkan akan situasi yang kurang menguntungkan yang menyebabkan kerugian yang besar dari sisi peternak. Adapun dari pihak pemerintah dihadapkan dengan penyakit mulut dan kuku ini sehingga pemerintah harus mampu merespon dan menangani wabah penyakit ini secepat mungkin dikarenakan ekonomi yang berfokus pada ketahanan pangan dan kesejahteraan rakyat disokong dengan progresifitas peternakan dalam negeri.

Latar belakang kondisi di atas menarik untuk dikaji lebih mendalam terhadap penyebaran penyakit mulut dan kuku pada ternak. Permasalahan tersebut akan dijelaskan dalam beberapa aspek penyebaran penyakit mulut dan kuku di eks Karesidenan Semarang yang antara lain terkait dengan, pertama peternakan di eks Karesidenan Semarang pada masa orde baru dengan program Pelita III, kedua mengenai berkembang dan menyebarnya penyakit mulut dan kuku di wilayah eks Karesidenan Semarang di tahun 1981-1986, serta bagaimana dampak dan penanganan wabah penyakit mulut dan kuku di eks Karesidenan Semarang tahun 1981-1986.

METODE

Peneilitian ini bersifat ilmiah dimana hal ini harus didukung dengan bukti dan fakta sejarah yang ditemukan sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan sebagai penlitian sejarah. Bukti dan fakta tersebut kemudian diolah sehingga menjadi data bagi penulis untuk menginterpretasikan penulisan sejarah penyebaran penyakit mulut dan kuku pada ternak di Karesidenan Semarang 1981-1986. Penulisan ini tidak luput dari metode sejarah yang sudah ada meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi (Kuntowijoyo, 1994). Penulisan ini didukung dengan sumber-sumber primer seperti arsip SK Menteri Pertanian, surat kabar sejaman tentang penyakit mulut dan kuku di wilayah yang dijaki, dan wawancara pihak terkait, hingga sumber sekunder dengan mengandalkan bacaan dari buku buku yang dapat mendukung penulisan ini serta artikel terkait.

Arsip yang didukung berasal dari penelitian lapangan yang diperoleh dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Semarang serta Arsip Gedung Suara Merdeka. Hal ini merliputi beberapa surat kabar dari Suara Merdeka dan Kompas. Penelusuran sumber lisan pun dilakukan guna mengetahui apa yang terjadi pada saat peristiwa tersebut dari pihak yang terlibat agar peristiwa dapat ditulis dengan data yang kuat. Sumber lisan ini menggunakan metode wawancara dengan informan peternakan kalangan petani ternak yang terlibat dengan Sartono. Sumber Sekunder dalam penulisan ini menggunakan beberapa buku, artikel ilmiahn dan internet terkait yang sesuai dengan pembahasan penyakit mulut dan kuku, peternakan di Karesidenan Semarang, hingga kajian-kajian terhadap penyakit mulut dan kuku yang berkembang di Karesidenan Semarang tahun 1981-1986.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peternakan di eks Karesidenan Semarang Pada Masa Pelita III

Eks Karesidenan Semarang merupakan sebuah wilayah di Jawa Tengah dengan basis peternakan cukup besar di skala nasional dari masa ke masa terutama pada masa orde baru. Eks Karesidenan Semarang memiliki beberapa wilayah dengan perkembangan yang menonjol di masa orde baru antara lain di dalam administratif Kabupaten Semarang, dan Grobogan. Daerah Kabupaten Semarang dengan sektor peternakan paling menonjol antara lain daerah Ungaran, Salatiga dan Ambarawa. Grobogan sebagai daerah berbatasan dengan Blora juga memiliki basis peternakan yang memiliki andil dalam perkembangan peternakan di Jawa Tengah khususnya administratif eks Karesidenan Semarang (BPS Jawa Tengah, 1981-5).

Peternakan di wilayah administratif eks Karesidenan Semarang mampu berkembang dengan cukup pesat dan signifikan sejak Soeharto memulai program Pelita III(1979-1984) dengan ditempuh melalui program *ekstensifikasi* (peningkatan populasi ternak) dan *intensifikasi* (peningkatan produksi pasaran ternak. Program ini merata di berbagai wilayah terutama di Karesidenan Semarang dimulai sejak tingkat pertama Pelita III 1979 (Nasution, 2005). Wilayah eks Karesidenan Semarang dalam perkembangannya sangat berbanding lurus dengan kebijakan Soeharto dalam meningkatkan swasembada dan ketahanan pangan dalam program Pelita III. Upaya yang dilakukan orde baru dalam kepemimpinan Soeharto telah meningkatkan produksi daging ternak baik itu sapi, kerbau, ataupun hewan ternak berkaki empat lainnya dalam mempertahankan pangan dalam negeri yang mulanya hanya terpaku pada beras sebagai bahan pokok dalam kehidupan (Sudrajat, 2000).

Eks Karesidenan Semarang mendapat surplus peternakan disebabkan ekstensifikasi seperti peningkatan mutu bibit pada ternak hingga intensifikasi yang mengambil wilayah tersebut tepatnya di Salatiga sebagai salah satu penopang peternakan nasional di tahun tersebut. Surplus ternak yang didapat di wilayah eks Karesidenan Semarang bertambah seiring tahun sehingga mampu berkontribusi sebagai penyokong peternakan di wilayah Jawa Tengah. Kontribusi tersebut dapat dilihat pada tahun anggaran 1983/1984 Jawa Tengah mampu mendapatkan jatah ternak dari pusat yang tergolong cukup banyak secara nasional nomor 1 diatas Jawa Timur pada taun tersebut sebagai salah satu daerah dengan basis peternakan terbesar di wilayah nasional (Suara Merdeka, 1983).

Jenis ternak (ekor)						
Daerah Tk. I	Sapi	Kerbau	Kambing	Domba	Kuda	Babi
D.I. Aceh	2.250	9.250	1.000	—	1.000	—
Sum. Barat	2.500	5.250	2.500	—	—	—
Lampung	2.400	100	20.000	2.200	—	3.000
Jawa Tengah	81.200	32.500	287.000	145.750	—	30.000
D.I. Yogyakarta	16.000	1.600	31.000	10.000	—	4.000
Jawa Timur	125.000	17.000	60.000	20.000	—	10.000
Bali	25.000	—	—	—	—	100.000
N.T.B.:						
- P. Lombok	11.000	2.500	2.000	1.000	—	—
- P. Sumbawa	2.500	11.000	3.000	500	6.000	—
N.T.T.:						
- P. Timor	30.000	1.500	1.000	1.000	—	—
- P. Sumba	2.200	1.750	—	—	2.800	—
- P. Flores	600	1.750	—	—	750	—
Sulawesi Selatan	20.000	12.500	—	—	—	—
Sulawesi Utara	10.000	—	2.000	—	—	1.000
Sulawesi Tengah	5.000	1.000	2.000	500	—	1.000
Jumlah:	347.850	97.500	415.500	180.250	10.550	209.000

Gambar 1 Jatah ternak setiap daerah dengan kenaikan surplus ekonomi Tahun Anggaran 1983/1984.

(Sumber : Suara Merdeka. Senin, 10 Januari 1983. Hlm VIII. Edisi Ekonomi dan Keuangan).

Perkembangan peternakan eks Karesidenan Semarang dapat dilihat dari Kabupaten Semarang yang telah diakui oleh pemerintah daerah khususnya dari Gubernur Jawa Tengah dengan diberikannya penghargaan Duaja pada tanggal 15 agustus 1981 dalam tahun anggaran 1981/1982. Pelaksanaan pembangunan sektor peternakan di daerah ini berpedoman dengan Rencana Pembangunan Lima Tahun tingkat II (1979,1980 -1983,1984). Pedoman pokok tersebut juga berorientasi pada pedoman tentang program pembangunan Provinsi Jawa Tengah Pelita III, tentang kebijaksanaan operational dan program proyek peternakan nasional, serta pembangunan pertanian (Suara Merdeka, 1981). Kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah ditahun-tahun tersebut dalam upaya pembangunan sektor peternakan di daerah Kabupaten Semarang dengan target mempertahankan kelestarian sumber ternak dengan meingkatkan populasi ternak dan mutu ternak melalui usaha-usaha inseminasi buatan, penyediaan bibit pejantan yang unggul, serta perbaikan mutu makanan ternak (Suara Merdeka, 1981).

Pada tahun anggaran 1981/1982 setelah berhasilnya program meningkatkan populasi dan mutu ternak serta kemampuan produksi para petani ternak, pemerintah daerah Kabupaten Semarang membangun pasar hewan di Ambarawa tepatnya di Desa Kupang, Ambarawa dengan tujuan meningkatkan kualitas dagang para petani ternak dalam upaya meningkatkan ekonomi rakyat yang berkelanjutan dan pendapatan daerah mandiri. Perkembangan peternakan Kabupaten Semarang juga dapat dilihat dalam turut serta dalam perkembangan proyek kereman sai nasional yang dilakukan oleh para petani ternak di Salatiga (Suara Merdeka, 1981). Hal ini didukung dengan ikut andilnya pemerintah pada masa itu untuk menjadikan Salatiga sebagai tempat pilot kereman sapi di tingkat nasional.

Perkembangan daerah Ungaran sebagai ibukota Kabupaten Semarang juga tidak luput dari pekembangan sektor peternakan. Peternakan sapi di Ungaran dalam sektor peternakan mampu menjadikan Ungaran turut serta sebagai penyangga Kabupaten Semarang. Hal ini disebabkan para petani ternak ungaran mampu memperkembangbiakan sapi bantuan dari Selandia Baru sebanyak 455 ekor meningkat menjadi 510 ekor sapi dalam jangka waktu 2 tahun (Suara Merdeka, 1986). Hal ini menjadikan pendapatan petani ternak di Kabupaten Semarang meningkat pesat bersamaan dengan meningkatnya mutu pasaran sisi setempat. Peningkatan produksi susu ini mampu mencapai 1,7 juta liter lebih dan dapat mencapai peningkatan 23% setiap tahunnya selama pelita III dimulai. Peningkatan yang dialami Ungaran juga merupakan hasil kerja sama dan saling bantu dengan Kendal,, dan wilayah dari Kabupaten Semarang lainnya. Kabupaten Grobogan dalam

perkembangan peternakan di wilayah Jawa Tengah khususnya administratif eks Karesidenan Semarang juga mengalami perkembangan yang cukup signifikan terlebih secara geografis Grobogan berdekatan dengan Blora yang dapat dibilang sebagai peternakan besar di Jawa Tengah. Grobogan mampu berkontribusi aktif dalam peternakan eks Karesidenan Semarang dengan terus menerus menoreh prestasi kontes ternak di wilayah Jawa tengah dari tahun 1984 hingga 1986 (Suara Merdeka, 1984).

B. Penyebaran Wabah PMK Eks Karesidenan Semarang 1981-1986

Penyakit mulut dan kuku merupakan sebuah penyakit pada hewan yang menyerang hewan berkaki empat antara lain sapi, kerbau, kambing, kuda hingga babi. Penyebaran penyakit mulut dan kuku ini diawali dari lolosnya hewan ternak impor yang telah terjangkit penyakit tersebut di Jawa Tengah tepatnya di Blora tahun 1981. Masuknya penyakit tersebut merupakan hasil dari terbukanya kran ekspor pada masa pelita III kebijakan dari Soeharto sebagai presiden yang menjabat pada masa itu (Arista, 2019). Kran ekspor yang dibuka secara besar baik hewan ternak, daging, hingga susu sapi tanpa didukung kesadaran peternak dan teknologi yang memadai menjadikan hal itu sebagai salah satu akibat menyebarnya penyakit tersebut menyebar di Jawa Tengah.

Eks Karesidenan Semarang yang mempunyai andil besar selain Blora dan Pati dalam bidang peternakan Jawa Tengah pada masa itu, ikut terkena dampak penyebaran penyakit mulut dan kuku yang cukup signifikan karena berbatasan dekat dengan Blora sebagai yang diketahui terdampak sangat besar di tahun tahun tersebut. Pada tahun 1981 diketahui ribuan kerbau di Blora terdampak penyakit mulut dan kuku hingga pada akhirnya akibat dari mudahnya penularan penyakit tersebut menjadikan daerah yang berbatasan langsung dengan daerah terdampak ikut terkena dampak penyebaran penyakit mulut dan kuku (Putri et al, 2022). Pada tahun 1981 daerah yang berbatasan langsung dengan Blora khususnya di wilayah eks Karesidenan Semarang bagian kabupaten Grobogan merupakan daerah yang agak terisolir namun hal itu kurang diindahkan oleh para peternak karena daerah tersebut diketahui cukup ramai dalam melakukan lalu lintas angkutan ternak. Berjangkitnya penyakit di wilayah eks Karesidenan Semarang yang diawali dari lalu lintas hewan ternak tanpa pengecekan secara lanjut mengakibatkan bibit penyakit mulut dan kuku berkembang secara massal di wilayah eks Karesidenan Semarang. Diketahui pada tahun 1981 penyebaran awal di wilayah eks Karesidenan Semarang tepatnya di Grobogan yang berbatasan dengan Blora sebagai titik awal penyebaran PMK di Jawa Tengah. Sebanyak 23 ekor sapi yang positif tertular PMK dalam beberapa kecamatan di Grobogan (Suara Merdeka, 1981). Akibat dari lalu lintas ternak yang cukup ramai dan pengawasan masih kurang membuat penyebaran tersebut menyebar ke berbagai kabupaten di wilayah eks Karesidenan Semarang.

Pada tahun 1983, menurut laporan Dinas Peternakan Jateng sebanyak 4000 ekor ternak yang telah terkena penyakit mulut dan kuku di beberapa kabupaten. Laporan tersebut berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh Dinas Peternakan Dati I Jateng dan Ditjen Peternakan (Tjahyono, 2025). Penyakit ini mampu menyebar dalam jangka waktu yang cepat hingga dapat menyebabkan produksi daging dan susu mengalami kerugian yang cukup fatal. Daerah dengan penyebaran yang cukup terkonsentrasi antara lain Kabupaten Grobogan dengan tingkat isolasi hewan ternak yang ketat, dan Kabupaten Semarang serta Salatiga. Daerah-daerah tersebut adalah daerah eks Karesidenan Semarang yang mempunyai peternakan yang dapat dibilang sangat berkembang pada kurun waktu 1983/1984.

C. Dampak dan Penanganan Wabah PMK Wilayah Karesidenan Semarang 1981-1986

Penyakit menular mulut dan kuku pada ternak di wilayah administratif eks Karesidenan Semarang pada tahun 1981-1986 awal telah membuat kondisi di beberapa elemen kehidupan sosial masyarakat mengalami gangguan yang cukup signifikan bagi yang terlibat baik dari pihak pemerintah, petani ternak, hingga masyarakat yang membutuhkan. Penyakit menular mulut dan kuku ini sangat masif dan cepat sekali penyebarannya dan tidak dibarengi dengan kesiapan oleh pihak pihak yang terlibat dalam sub sektor peternakan. Hal ini mengakibatkan peternakan di wilayah eks Karesidenan Semarang pada tahun 1981-1983 mengalami penurunan yang cukup signifikan terkait

ternak berkaki empat antara lain sapi, kerbau, kambing, hingga babi. Pada awal tahun 1984 setelah penyebaran yang melonjak di tahun 1983 penurunan harga daging dan susu hewan ternak dapat dibilang kurang menguntungkan para petani ternak di wilayah eks Karesidenan Semarang. Kasus yang terjadi Kabupaten Semarang penurunan harga daging pada tahun 1983 yang harusnya bisa dirata-rata Rp 3.500 per kg harus turun di tahun 1984 dengan rata-rata sekitar Rp 2.400 per kg (Suara merdeka, 1984). Hal ini mengakibatkan banyak para petani ternak yang mengalami kerugian dan untung yang sedikit di pasar ternak lokal.

Pada tahun 1983, penyakit menular ini menular secara cepat dan masif sehingga para petani ternak tidak siap akan apa yang dihadapi oleh para ternak. Para petani ternak di wilayah eks Karesidenan Semarang menghadapi situasi yang cukup merugikan dikarenakan hewan ternak yang dipelihara mengalami sakit yang mendadak meskipun penyakit ini tidak mematikan namun ada indikasi hewan ternak bisa mati. Pemerintah daerah secara cepat mengupayakan vaksinasi hewan ternak yang terjangkit penyakit mulut dan kuku agar penyakit ini dapat ditekan sebisa mungkin. Vaksinasi dilakukan oleh pemerintah daerah dengan memberi kebijakan hewan yang divaksin adalah hewan ternak yang terjangkit belum parah, sedangkan hewan ternak yang terjangkit parah terpaksa harus disembelih guna menekan penyebaran penyakit ini (Suara Merdeka, 1983). Hal ini disebabkan oleh belum meratanya pemberian vaksin di tingkat daerah terutama wilayah eks Karesidenan Semarang yang jauh dari pusat Ibukota Jakarta.

Kurangnya tenaga medis akan situasi yang panik ini menjadikan adanya hambatan dalam upaya penekanan penyebaran penyakit mulut dan kuku ini. Pada tahun 1984 Grobogan juga teridentifikasi banyaknya lembu yang berjangkit penyakit mulut dan kuku. Pemerintah daerah Grobogan di tahun tersebut dengan cepat mengupayakan kepada seluruh elemen masyarakat hingga ke tingkat RT di desa untuk melakukan penutupan daerah ternak Grobogan seperti halnya hewan ternak dari luar Grobogan tidak boleh masuk ke daerah Grobogan begitupun sebaliknya hewan ternak daerah Grobogan tidak boleh keluar dari daerah Grobogan. Hal ini diupayakan karena terdapat beberapa Kecamatan di Grobogan teridentifikasi PMK. Dinas Peternakan pada tahun tersebut merilis laporan terakhir bahwa ada sembilan ekor sapi di Kecamatan Ngaringan, seekor di Kecamatan Grobogan, dan tiga ekor di Kecamatan Gabus (Suara Merdeka, 1984). Pada tahun tersebut, lalu lintas perdagangan hewan ternak di Grobogan juga diawasi dengan ketat oleh aparat keamanan setempat hal ini diperintah karena masih adanya pedagang hewan yang tidak mengindahkan peraturan daerah yang sudah ditetapkan. Grobogan yang berbatasan dekat dengan Blora menjadikan aparat keamanan setempat dikerahkan di perbatasan Dopleng (Kabupaten Blora) dengan Gabus (Kabupaten Grobogan) serta perbatasan daerah Kunduran (Blora) dengan Ngaringan (Grobogan) dengan memasang palang-palang agar lalu lintas ternak di kedua kabupaten tersebut berhenti untuk diperiksa.

Perang melawan penyakit mulut dan kuku (PMK) yang pada masa itu melanda wilayah eks Karesidenan Semarang membuat tenaga medis yang ada pada masa itu siang hingga malam bekerja. Dalam mengatasi penyebaran penyakit mulut dan kuku pada ternak yang sangat masif sejak tahun 1981 dan melonjak di tahun 1983 upaya yang dilakukan pemerintah daerah dengan vaksinasi massal dan penyemprotan pembasmi virus dikandang yang terjangkit serta yang belum terjangkit dilakukan secara maksimal. Penyuluhan-penyuluhan yang diperintahkan pemerintah daerah di wilayah eks Karesidenan Semarang juga digencarkan guna menaikkan mutu pendidikan dan kualitas beternak para petani ternak pada masa itu. Selama beberapa tahun tersebut hingga pada tahun 1984 vaksinasi massal dilakukan secara merata diseluruh wilayah eks Karesidenan Semarang baik dengan peternakan yang belum parah atau belum terjangkit penyakit ini hingga yang sudah parah. Hewan ternak yang sudah dilakukan vaksinasi ditandai dengan dilubangnya telinga pada hewan yang divaksin untuk membedakan antara hewan yang sudah divaksin dan belum (Tjahyono, 2025). Hal ini dilakukan pemerintah guna mempermudah pengidentifikasian dan pengorganisasian hewan ternak Pada tahun 1984 bukan hanya wilayah eks Karesidenan Semarang saja melainkan semua wilayah di pulau Jawa telah berhasil menekan penyebaran penyakit mulut dan kuku. Pemerintah pusat pada tahun 1986 dari keputusan menteri melalui surat keputusan Menteri Pertanian 260/Kpts/TN.510/5/1986 menyatakan bahwa Indonesia telah bebas dari penyakit

mulut dan kuku (PMK). Upaya yang dilakukan seluruh elemen baik dari pemerintah pusat hingga masuk ke tingkat RT membuat Indonesia telah resmi diakui bebas dari penyakit mulut dan kuku (PMK) oleh *Office International de Epizootes (OIE)* atau Organisasi Kesehatan Hewan Dunia sebagaimana yang tercantum dalam Resolusi OIE Nomor XI Tahun 1990, dan FAO/APHCA serta ASEAN mengirimkan tim guna mengevaluasi status bebas PMK di Indonesia.

PENUTUP

Persoalan penyakit mulut dan ternak di eks Karesidenan Semarang pada tahun 1981-1986 merupakan persoalan yang dapat dibilang sebagai perjalanan sejarah peternakan di Indonesia. Penyakit mulut dan ternak telah melanda dan menyebar secara pasif di wilayah eks Karesidenan Semarang. Penyakit tersebut menyebar secara cepat akibat dari terbukanya kran ekspor pelita III tanpa didukung oleh kesadaran peternak akan penyakit tersebut yang belum cukup dan teknologi yang kurang memadai. Penyebaran penyakit tersebut juga akibat dari kurangnya pengawasan akan lalu lintas hewan ternak, penjualan daging, dan susu dari area terisolir terdampak. Penyebaran penyakit ini mengakibatkan kerugian yang cukup signifikan bagi peternak wilayah eks Karesidenan Semarang dimana harga ternak hingga harga daging turun secara drastis. Beberapa metode pemberantasan penyakit mulut dan kuku sudah dilakukan oleh pemerintah daerah hingga pada tahun 1984 dilakukan vaksinasi massal yang diiniasi langsung oleh Direktorat Jenderal Peternakan Indonesia 1983/1984, hingga pada akhirnya 1986 secara nasional bahwa Indonesia dinyatakan bebas PMK dengan keputusan Menteri Pertanian. Pada tahun 1990, Indonesia telah diakui bebas PMK oleh organisasi *OIE* dalam resolusi OIE 1990.

Ucapan Terima Kasih

Puji Syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing karena dengan bimbingannya penulis mampu menyelesaikan penulisan tugas akhir ini dengan lancar. Tidak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak terlibat terutama keluarga atas dukungannya selama penulisan berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Blacksell, Stuart, et al. (2019). *A History of FMD Research and Control Programmes in Southeast Asia : Lesson From the Past Informing the Future*. Cambridge University Press.
- Firman, Achmad, et al. (2022). Dampak Ekonomi Akibat Outbreak Penyakit Mulut dan Kuku Pada Ternak Sapi dan Kerbau di Indonesia. Jawa Barat. *Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*. <http://dx.doi.org/10.25157/ma.v8i2.7749>
- Harapin, Hafid, et al. (2022). *Membangun Peternakan (Menguntungkan dan Berkelanjutan)*. Bandung. CV. Widina Media Utama.
- Jawa Tengah Dalam Angka 1981. BPS Provinsi Jateng
- Jawa Tengah Dalam Angka 1983. BPS Provinsi Jateng
- Jawa Tengah Dalam Angka 1984. BPS Provinsi Jateng
- Jawa Tengah Dalam Angka 1985. BPS Provinsi Jateng
- Lampiran Surat Keputusan Menteri Pertanian No 487/Kpts/Um/6/1983 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan Menular.
- Kompas. (1981, Juni 25). Tahun 1984 Hewan di Indonesia Bebas PMK. Hlm 8
- Kompas. (1983). PMK meluas ke tetangga Blora, yaitu Kabupaten Grobogan.
- Kompas. (1986) Indonesia Dinyatakan Bebas Penyakit Mulut dan Kuku
- Muljana, Wahyu. (1982). *Pemeliharaan dan Kegunaan Ternak Sapi Perah*. Semarang. Aneka Ilmu.
- Nasution, Aladin. (2016) Studi Evaluasi Pengembangan Ternak Sapi dan Kerbau. <https://epublikasi.pertanian.go.id/berkala/index.php/fae/article/view/1190>.
- Okti, Dwi, et al. (2023). Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Virus PMK Pada Ternak di Desa Mojosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Jawa Timur. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Hewani*. Vol 2. No. 1. <https://doi.org/10.33024/jkpm.v6i5.8508>
- Putri, Satya, et al. (2022). Kesiagaan Darurat Veteriner Indonesia (Seri : Penyakit Mulut dan Kuku).

- Surat Keputusan Menteri Pertanian No 487/Kpts/Um/6/1983 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan Menular.
- Suara Merdeka. (1981). Di Grobogan Juga Berjangkit Penyakit Kuku dan Mulut Lembu.
- Suara Merdeka. (1981). Ribuan Ternak di Daerah Blora Terserang Penyakit Mulut dan Kuku..
- Suara Merdeka. (1981). Tim Ahli Bekerja Siang Malam Berantas Penyakit Kuku dan Mulut.
- Suara Merdeka. (1982). TINJAU RS : Beberapa Anggota Komisi E DPRD Jateng Dipimpin Wakil Ketua Komisi E Drs Robbani Thoha ketika meninjau salah satu ruangan di RS Muwasi.
- Suara Merdeka. (1984, Januari 31). Bebas PMK di Grobogan Ditandai Pawai dan Kontes Ternak.
- Suara Merdeka. (1983, Januari 10). Karena Banyak Daerah Yang Mengalami Surplus Produksi.
- Suara Merdeka. (1984, Februari 8). Populasi Ternak Sapi Potong Naik Namun Ternak Pekerja Turun.
- Suara Merdeka. (1983, Agustus 4). Ribuan Sapi Kerbau di Grobogan Berpenyakit Mulut dan Kuku.
- Suara Merdeka. (1986, Januari 26) Sapi Bantuan Selandia Baru Berkembang Baik di Ungaran.
- Suara Merdeka. (1983, Agustus 3). Yang Kini Baru Terjangkit (Penyakit Mulut dan Kuku Pada Hewan Ternak).
- Suara Merdeka. (1985) . VAKSINASI MASSAL : Pelaksanaan program vaksinasi PMK (Foto : Suara Merdeka/B11-III.1985)
- . Sarjanawati, Sri Wahyu. (2010). Peningkatan Perekonomian Rakyat di Karesidenan Rembang Melalui Pengelolaan Ternak tahun 1900-1942 (Suatu Kajian Historis). Forum Ilmu Sosial. Vol 37. No 2. <https://doi.org/10.15294/fis.v37i2.1532>
- Setiadi, Bambang. (2001). Beternak Sapi Daging dan Masalahnya. Semarang. Aneka Ilmu.
- Silitonga, Risma, dkk. (2016). Ancaman Masuknya Virus Penyakit Mulut dan Kuku Melalui Daging Ilegal di Entikong, Perbatasan Darat Indonesia dan Malaysia. Jakarta. Jurnal Sain Veteriner. <https://doi.org/10.22146/jsv.27222>
- Subekti, Endah. (2008). Peranan Bidang Peternakan Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. Mediagro. Vol 4. No 2. Hlm 32-38. <https://doi.org/10.31942/mediagro.v4i2.544>
- Subronto. Ilmu Penyakit Ternak I. (2008). Yogyakarta. Gajah Mada University Press
- Sudarsono, E, R. (2022). Kajian Epidemiologi Kejadian Diduga Penyakit Mulut di Kabupaten Lamongan. Journal of Basic Medical Veterinary. Vol 11. No. 1. Hlm 56-63. <https://doi.org/10.20473/jbmv.v11i1.37197>
- Sudrajat. (2000). Menjelang dua Abad Sejarah Peternakan dan Kesehatan Hewan Indonesia : Peduli Peternak Rakyat. Jakarta. Yayasan Agrinda Mandiri.
- Widyana, Syeri. (2023). Implementasi Kebijakan Penanganan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku di Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. Surabaya. Jurnal Penelitian Administrasi Publik. Vol 3. No 4. <https://aksiologi.org/index.php/praja/article/view/1063>
- Rachmawati. (2022). Terdeteksi Tahun 1887, Ini Sejarah Penyakit Ternak di Indonesia. <https://regional.kompas.com/read/2022/05/13/081500478/terdeteksi-tahun-1887-ini-sejarah-penyakit-mulut-dan-kuku-pada-ternak-di?page=all>. Diakses pada tanggal 2 februrari 2025.
- Tjahyono. (2025, Januari 18) Cara Presiden Soeharto Membebaskan Indonesia dari PMK . <https://www.kompas.id/artikel/cara-presiden-soeharto-membebaskan-indonesia-dari-pmk>. Diakses pada tanggal 4 april 2025.